BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

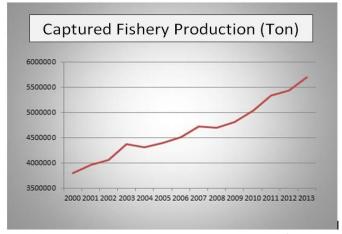
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia¹, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Termasuk diantaranya sumber daya kelautan dan sumber daya ikan (SDI). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan pada tahun 2017 potensi tangkapan SDI Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan mencapai 12,5 juta ton². *Food and Agriculture Organizations* menyatakan bahwa SDI merupakan salah satu sumber daya alam dengan nilai jual tertinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara global, pada tahun 1984 perdagangan ikan bernilai US\$90 juta hingga US\$0,2 milyar pada tahun 2004 dan mencapai US\$0,5 milyar pada tahun 2014³. Faktor ini menjadikan ekonomi kelautan salah satu tumpuan pembangunan ekonomi nasional. Statistik berikut memperlihatkan peningkatan produk serta pendapatan dari sektor perikanan Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2013.

¹ Robert Cribb and Michele Ford. TT. *Indonesia as an Archipelago: Managing Islands, Managing the Seas* [daring] dalam <a href="https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/16146/Cribb%20&%20Ford%20Indonesia%20as%20an%20Archipelago.pdf;jsessionid=9E8B915C830B3210A23D3191CF8BB33D?sequence=2 Diakses: 15 Jan 2020

² Tempo. 2017. *Potensi Ikan Tangkap RI Mencapai 12,5 Juta Ton* [daring] dalam https://bisnis.tempo.co/read/886011/ potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai-125-juta-ton. Diakses: 13 Jan 2020

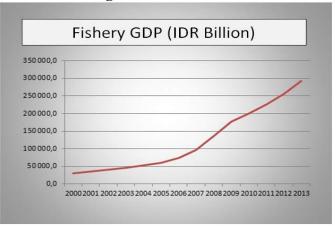
³ Nur Sahrizal, Evi Oktavia dan Masrufah. 2016. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir* [daring] dalam https://media.neliti.com/media/publications/48274-ID-statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2016.pdf. Diakses: 13 Jan 2020

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Jumlah Tangkapan SDI



Sumber: Nusantara Maritime News 4

Gambar 1.2 Grafik Peningkatan Nilai Produk Perikanan 2000-2013



Sumber: Nusantara Maritime News⁵

Grafik diatas menunjukkan bahwa kuantitas ikan yang ditangkap serta penghasilan yang diperoleh terus meningkat dari tahun ke tahun. Sumber daya alam yang dimiliki suatu negara seyogyanya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat⁶ negara tersebut. Tujuan ini dapat dicapai dengan pemanfaatan langsung SDI oleh masyarakat melalui diperdagangkan secara domestik maupun perdagangan internasional atau di ekspor ke negara lain. Namun demikian

⁴ Nusantara Maritime News. 2015. *Illegal Fishing and Fishing Business Prospect* [daring] dalam https://maritimenews.id/illegal-fishing-and-fishing-business-prospect-2/. Diakses: 21 Jan 2020 ⁵ *Ibid*.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33

ternyata bahwa tingginya nilai jual SDI menyebabkan marak terjadi IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) Fishing atau pencurian ikan dan sumber daya laut lain.

Secara umum, *IUU Fishing* merupakan tindakan penangkapan/pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan tertentu. *Illegal, unreported, unregulated* merupakan tindakan yang melanggar atau tidak sah secara undang-undang. *Illegal fishing* dilakukan dalam wilayah teritorial atau zona ekonomi eksklusif (ZEE) suatu negara tanpa disertai perjanjian perdagangan dan perizinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun *Sinking policy for IUU Fishing ships* bukan merupakan kebijakan baru di Indonesia. Sebelumnya penenggelaman kapal asing illegal dilakukan Indonesia pada Januari 2003 yaitu penenggelaman 4 kapal motor berbendera Filipina yang mencuri ikan di Perairan Sulawasi Utara oleh TNI AL dan 2 kapal penangkap ikan asing asal Thailand di Selat Gelasa, Bangka Belitung pada tahun 2004⁷. Akan tetapi kebijakan tersebut secara konsisten dilaksanakan akhir tahun 2014 pada masa pemerintahan baru Presiden Joko Widodo⁸.

Komitmen Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia tertuang dalam lima klaster rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia yang meliputi budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim⁹. Kebijakan penenggelaman kapal yang tidak memiliki dokumen resmi

-

⁷ Hertria Maharani Putri, et al. 2017. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum* dalam Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan [daring] dalam http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/download/6095/5690 Diakses: 13 Jan 2020

⁸ Gatha Ginting. 2018. *Minister Susi declares ship-sinking policy success* [daring] dalam https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/22/minister-susi-says-ship-sinking-policy-success. html. Diakses: 15 Jan 2020

⁹ Website Resmi Kantor Staf Presiden. 2019. *Visi Poros Maritim Jokowi: Karena Masa Depan Ada di Laut* [daring] dalam http://ksp.go.id/visi-poros-maritim-jokowi-karena-masa-depan-ada-di-laut/ Diakses: 02 Mar 2020

dan melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan) serta Deklarasi Juanda 13 Desember Tahun 1957 sebagai landasan hukum dalam menjaga dan mempertahankan wilayah perairannya. Deklarasi Juanda berbunyi :

"Laut wilayah atau biasa disebut laut teritorial, ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus. Wilayah laut meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, maupun ruang di atas laut, serta seluruh kekayaan yang di kandungnya. Landas kontinental dapat diartikan sebagai lanjutan daratan suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Sumber-sumber daya alam yang berada dilandas kontinen adalah milik pemerintah Republik Indonesia" 10

Hukum internasional yang mengatur pengelolaan SDI diantaranya *United* Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982, FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995), United Nations Fish Stocks Agreement (1995), International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001 dan sejumlah peraturan Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)¹¹.

Nurdin menguraikan lima dampak negatif *IUU fishing* yaitu dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan, dampak terhadap perekonomian negara, dampak sosial, dampak lingkungan serta pelanggaran batas wilayah terhadap negara berdaulat¹². Pertama, maraknya penangkapan ikan illegal menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Akibatnya, negara

¹⁰ Hertria Maharani Putri, et al. Op.cit Hlm 92

¹¹ *Ibid*.

¹² Nurdin, et al. 2018. The implementation of vessel-sinking policy as an effort to protect indonesian fishery resources and territorial waters. [daring] dalam https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/137/1/012038/pdf. Diakses: 15 Jan 2020

kehilangan potensi pendapatan nasional dari sektor kelautan. Jumlah tangkapan ilegal semua jenis ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia diperkirakan mencapai 300 hingga 600 ton¹³ yang mencatat kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah per tahun¹⁴.

Kedua, praktek ilegal yang terjadi dalam waktu yang panjang secara langsung mempengaruhi kehidupan nelayan tradisional yang mendominasi industri perikanan Indonesia. Akibatnya terjadi penurunan jumlah nelayan tradisional di Indonesia dari 1,6 juta menjadi 864 ribu rumah tangga (±50 persen), serta penurunan produksi perikanan tangkap di wilayah Kepulauan Riau dari tahun 2009 (225.469,00 ton) menjadi 133.108,00 tahun 2014¹⁵. Ketiga, *IUU Fishing* merusak ekosistem laut akibat teknik penangkapan destrukrif, penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau konstruksi jenis lain yang membahayakan pelestarian SDI¹⁶. Dilaporkan bahwa *illegal fishing* yang terjadi hingga saat ini telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen¹⁷. Di perairan Indonesia, ribuan kapal asing mengeksploitasi SDI dengan menggunakan surat izin menangkap ikan palsu berjumlah sekitar 7,000–10,000 KIA¹⁸. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia juga beranggapan bahwa *illegal fishing* merupakan tindak pidana yang serius karena *IUU fishing*

_

Diakses: 13 Jan 2020

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Berita Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2015. Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah! [daring] dalam https://news.kkp.go.id/index.php/kerugian-negara-akibat-illegal-fishing-101-triliun-rupiah/.

¹⁵ Badan Pusat Statistik. 2015. dalam Khodijah Ismail, dkk. 2018. *Laporan Penelitian: Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Paska Penerapan Kebijakan IUU Fishing*. [daring] dalam https://www.conservationstrategy.org/sites/default/files/fieldfile/MFP_Natuna_Bahasa_Optimized Diakses: 14 Jan 2020

¹⁶ Nurdin et al. 2018, Loc. Cit.

¹⁷ Safrezi Fitra. 2016. *Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan* [daring] dalam https://katadata.co.id/berita/2016/10/10/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan. Diakses: 14 Jan 2020

¹⁸ Nurdin et al. 2018, Loc. Cit.

merupakan *global crime*, yang tidak hanya berkenaan dengan pidana perikanan tetapi menyangkut manusia, perdagangan perbudakan, penyelundupan narkoba dan lain-lain¹⁹.

Selanjutnya, alasan mendasar mengapa *IUU Fishing* menjadi isu penting ialah bahwa praktek ini berkaitan dengan pelanggaran atau tindakan yang melemahkan kedaulatan suatu negara²⁰. Dimana nelayan baik yang menggunakan kapal kecil dan besar yang berasal dari negara tetangga memasuki wilayah Indonesia tanpa izin sah yang diikuti aktivitas pencurian sumber daya laut. Mengacu kepada alasan-alasan tersebut pemerintah Indonesia memutuskan kebijakan membakar, meledakkan dan atau menenggelamkan kapal asing yang tertangkap melakukan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Undang-Undang Perikanan RI dalam pasal 69 ayat (4) menyebutkan Sanksi pidana pencurian ikan:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Kebijakan merupakan implementasi nyata dari penegakan hukum yang bersifat mengikat dan/atau memaksa. Kebijakan bersifat *goal oriented* yang dibentuk suatu pemerintahan dalam lingkungan politik dan sistem administrasinya²¹. Dan pada umumnya kebijakan juga dibuat sebagai bentuk

¹⁹ Ibid

Haryanto dan Joko Setiyono. 2017. *Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional* dalam Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017 p.71

²¹NIILM University. TT. *Public Policy* [daring] dalam https://niilmuniversity.in/coursepack/humanities/Public Policy.pdf. Diakses: 15 Jan 2020

tindakan untuk mengatasi masalah atau isu tertentu dengan sanksi hukum dan otoritas yang mengikutinya²².

Implementasi kebijakan ini adalah bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan SDI bagi kepentingan nasionalnya²³. Haryanto dan Setyono meyakini bahwa kebijakan ini akan memberikan *multiple effect* yakni memperkuat diplomasi maritim Indonesia, mereduksi sumber konflik di laut salah satunya *illegal fishing*, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut²⁴. Lebih lagi kebijakan ini diyakini mampu menimbulkan efek jera atau *deterrent effect* bagi pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Dibawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kapal ikan asing yang pertama kali diledakkan dan ditenggelamkan pemerintah Indonesia ialah tiga kapal milik Vietnam pada 5 Desember 2014 di Laut Natuna, Kepulauan Riau²⁵. Kapal tersebut memuat 33 orang kru serta 2.1 ton ikan curian di Pulau Tarempa²⁶. Data menunjukkan bahwa mayoritas KIA yang tertangkap melakukan *illegal fishing* dan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya merupakan KIA yang berasal dari Vietnam²⁷. Dilaporkan bahwa dari 503 kapal asing yang telah ditenggelamkan 284 diantaranya merupakan Kapal

-

²² Ibid.

²³ Hertria Maharani Putri et al, op. cit. Hlm 95

²⁴ Haryanto dan Joko Setiyono. 2017. Loc. Cit

²⁵ Sulasi Rohingati. 2014. *Penenggelaman Kapal Ikan Asing: Upaya Penegakan Hukum Laut Indonesia* Vol. VI No. 24/II/P3DI/Desember/2014 [daring] dalam https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-28.pdf. Diakses: 01 Mar 2020

²⁶ Nurdin et al, op. cit. Hlm 2

²⁷ Nurdin et al, op. cit. Hlm 6

Perikanan Asing (KIA) milik Vietnam²⁸. Namun demikian, disamping banyaknya jumlah KIA Vietnam yang telah diamankan pemerintah Indonesia, aktivitas *illegal fishing* yang berasal dari Vietnam terus berlangsung.

Aktivitas pencurian ikan juga disertai bentrokan antara kapal patrol maritim Indonesia dengan KIA penjaga pantai Vietnam yang berusaha menyelamatkan kapal-kapal illegal tersebut dari pengejaran Satgas maritim Indonesia²⁹. Laporan Indonesia Marine Fellows Program menyebutkan selama periode 2016-2017 pelaku kapal *IUU Fishing* 98,5% berasal dari Vietnam³⁰. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dari 125 kapal ikan illegal yang ditenggelamkan pada tahun 2018, 83 diantaranya merupakan kapal milik Vietnam³¹. Merespon kebijakan Indonesia pemerintah Vietnam pada akhirnya memberikan peringatan kepada Indonesia.

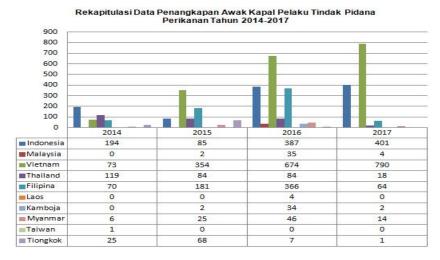
Gambar 1.3 Statistik Negara Asal Kapal IUU Fishing di Indonesia

²⁸ Aceng Mukaram. 2019. *Menteri Susi Tenggelamkan 503 Kapal Pencuri Ikan, Terbanyak dari Negara Mana?* [daring] dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/3957534/menteri-susitenggelamkan-503-kapal-pencuri-ikan-terbanyak-dari-negara-mana. Diakses: 15 Jan 2020

²⁹ Fadli and Tama Salim. 2017. *RI, Vietnam vessels clash in Natuna* dalam The Jakarta Post [daring] dalam https://www.thejakartapost.com/news/2017/05/23/ri-vietnam-vessels-clash-in-natuna.html. Diakses: 19 Jan 2020

³⁰ Khodijah Ismail et al. 2018. *Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Paska Penerapan Kebijakan IUU Fishing* dalam Laporan Penelitian IMFP

³¹ Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 2020. *Kapal Pengawas KKP Tangkap 106 Kapal Illegal Fishing di 2018* [daring] dalam https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/8537-kapal-pengawas-kkp-tangkap-106-kapal-illegal-fishing-di-2018. Diakses: 01 Mar 2020



Sumber: Katadata Online³²

Gambar 1.4 Jumlah Kapal Terbanyak yang Ditenggelamkan

³² Katadata.2019. *Cek Data: Benarkah 488 Kapal Illegal Fishing Sudah Ditenggelamkan* [daring] dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan. Diakses: 24 Jun 2020



Sumber: Katadata.co.id³³

1.2 Rumusan Masalah:

Banyaknya kapal ikan Vietnam yang ditangkap dan ditenggelamkan pemerintah Indonesia ternyata merugikan Vietnam. Hal ini ditunjukkan melalui surat-surat diplomasi yang dikirimkan oleh pemerintah Vietnam kepada pemerintah Indonesia terkait kebijakan tersebut. Disertai pernyataan-pernyataan ketidaksenangan Vietnam dengan kebijakan Indonesia. Pemerintah Vietnam dalam beberapa pertemuan bilateral dengan Indonesia, baik dengan Menteri

³³ Katadata.co.id. 2019. *Sejak 2014, Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 503 Kapal Pencuri Ikan* [daring] dalam https://katadata.co.id/infografik/2019/05/09/sejak-2014-menteri-susi-sudah-tenggelamkan-503-kapal-pencuri-ikan. Diakses: 24 Jun 2020

Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mendiskusikan implementasi dan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang diimplementasikan Indonesia di wilayah perairannya, secara langsung dalam kaitannya dengan kapal-kapal Vietnam yang ditenggelamkan.

Berdasarkan kondisi ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah "Apakah *Sinking Policy for IUU Fishing Ships* Berdampak terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Vietnam pada Tahun 2014-2019?".

1.3 Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisa secara empiris dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan penenggelaman dan peledakan KIA yang diberlakukan Indonesia di wilayah perairannya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vietnam.

1.4 Manfaat Penelitian:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai isu kontemporer global yang dapat mempengaruhi berbagai macam aspek dari sebuah negara. Kedua, melalui penelitian ini, meningkatkan kemampuan analisis penulis untuk memahami fenomena kontemporer dalam hubungan internasional.

1.4.2 Secara Empiris

Secara empiris, manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini ialah bahwa penelitian ini bisa menjadi dapat menjadi masukan bagi pihak terkait isu keamanan di sebuah negara utamanya di wilayah perairan. Dan juga sebagai acuan referensi bagi akademisi di bidang hubungan internasional berikutnya. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai isu-isu global.

1.5 Kerangka Pemikiran:

1.5.1 Level of Analysis

Tamaki menyatakan bahwa peringkat analisis (*level of analysis*) merupakan cara menganalisa bagaimana suatu kebijakan luar negeri dibuat dalam berbagai tingkatan, bisa dalam tingkatan negara (*state*) dan pembuat kebijakan individu (*individu policy maker*)³⁴. Menurut Tamaki peringkat analisis dibutuhkan secara khusus dalam penelitian hubungan internasional berkaitan dengan kompleksnya sistem internasional³⁵. Namun dengan menggunakan peringkat analisis, kita akan lebih mudah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan suatu kebijakan, mempermudah kita menganalisa keputusan apa yang ditentukan oleh siapa dan berdasarkan kondisi yang seperti apa keputusan tersebut dibuat³⁶.

Selain itu penggunaan peringkat analisis juga akan membantu kita memahami bagaimana masing-masing peringkat saling mempengaruhi satu dengan yang lain³⁷. Dengan demikian kita akan dapat menganalisa suatu kebijakan dengan berbagai perspektif yang komplit dan mendalam. Rourke

³⁶ *Ibid*.

12

³⁴ TAMAKI, T. 2015. Levels of analysis of the international system. IN: Kavalski, E. (ed.) Encounters with World Affairs: An Introduction to International Relations. Farnham: Ashgate, pp. 85-106.

 $^{^{35}}$ Ibid.

³⁷ *Ibid*.

menyebutkan ada 3 peringkat analisis dalam proses suatu kebijakan luar neger, yaitu level individu, level negara dan level sistem³⁸. Yang pertama adalah level individu, beberapa faktor yang mempengaruhi seorang individu pembuat kebijakan meliputi (a) faktor kognitif (b) faktor emosi (c) faktor psikologi (d) faktor biologis dan (e) persepsi³⁹.

Disisi lain ada juga yang menyebutkan level individu sebagai *idiosyncratic* analysis, yaitu bagaimana karakter seorang pemimpin akan menentukan sikapnya terhadap suatu kebijakan. Dalam *idiosyncratic analysis* terdapat 5 faktor dari seseorang yang akan membentuk pola pikirnya, yakni (1) *personality* atau kepribadian meliputi orientasi diri sikap dan kebiasaan seseorang (2) kesehatan fisik dan mental. Kondisi fisik dan mental yang sehat sangat penting untuk seorang pemimpin. Kondisi mental yang tidak sehat memperlihatkan kebijakan yang mengerikan dalam sejarah kebijakan yang dibuat oleh Adolf Hitler (3) ego dan ambisi (4) pengalaman pribadi dan sejarah politik serta (5) persepsi dan realitas operasional⁴⁰.

Peringkat analisis yang kedua adalah level analisis negara. Dalam level analisis ini terdapat tiga faktor yang akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yaitu tipe pemerintahan dan proses kebijakan luar negeri, tipe lingkungan (situasi) dan proses kebijakan luar negeri, tipe kebijakan dan proses kebijakan luar negeri serta kebudayaan negara (national attributes)⁴¹. Selain itu

John T. Rourke. 2008. *International Politics on the World Stage, 12th Edition* (New York City, New York: McGraw-Hill Companies, 2008) dalam Matthew Hanzel "Summary and Commentaires on Levels of Analysis and Foreign Policy" [daring] dalam https://vdocuments.mx/the-three-levels-of-analysis-in-international-relations.html. Diakses: 31 Oktober 2019

³⁹ John T. Rourke. 2008, Loc. Cit.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*.

dalam level negara ada juga aktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yaitu kepala negara dan eksekutif politik lainnya, para legislatif, kelompok kepentingan dan masyarakat. Ketiga, level analisis sistem yang berkaitan dengan struktur. Akan tetapi, penelitian ini berbicara mengenai dampak sebuah kebijakan sehingga tidak menggunakan *level of analysis*.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Bilateral Cooperation

Menurut Robert Keohane kerjasama bilateral merupakan kondisi dimana

"..actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of others, through a process of policy coordination. That the policies of each state have been adjusted to reduce their negative consequences for the other states⁴²".

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang disepakati dan dilakukan antara dua negara. Pada umumnya kerjasama bilateral dilakukan dalam usaha untuk berbagi sumber daya ataupun dalam upaya mencapai tujuan yang sama (common interest)⁴³. Kerjasama bilateral mencakup aspek apapun sesuai dengan kebutuhan dua negara, kerjasama ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, pendidikan, energi ataupun keamanan. Beberapa tujuan dari kerjasama bilateral menurut Muhammad yaitu (a) memenuhi kebutuhan dalam negeri (b) meningkatkan produktivitas dalam negeri (c) memperluas lapangan pekerjaan domestik (d)

⁴² Helen Milner. 1992. *International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses*. World Politics, 44, pp 466-496 doi:10.2307/2010546 (daring) dalam http://journals.cambridge.org/abstract_S0043887100015677. Diakses: 06 Feb 2020

⁴³ Mark Orwell. 2017. Bilateral Cooperation Agreement [daring] dalam https://bizfluent.com/facts-7340958-bilateral-cooperation-agreement.html. Diakses: 06 Feb 2020

meningkatkan pendapatan negara (e) menyeimbangkan neraca pembayaran dan (f) mempererat persahabatan dan diplomasi dengan negara lain⁴⁴.

Kerjasama bilateral dilakukan seluruh negara di dunia karena jumlah aktor dan kepentingan sangat terukur dibandingkan kerjasama multilateral. Karena factor tersebut pula kerjasama bilateral dianggap lebih efektif, kesepakatan lebih mudah dicapai oleh kedua belah pihak. Minca menyebutkan berbagai cara kerjasama bilateral dilakukan, melalui ekspor impor barang dan jasa antar kedua negara, petukaran pengetahuan dan pengalaman, pertukaran tenaga ahli, pertukaran teknologi dan informasi, konsultasi teknis dan juga melalui workshop atau pertemuan-pertemuan lainnya⁴⁵. Pada akhirnya kerjasama yang berlangsung terus menerus antara dua negara menyebabkan adanya keterikatan atau ketergantungan satu sama lain yang disebut sebagai interdependensi.

1.5.2.2 Interdependence Theory

Secara umum teori interdependensi merupakan teori mengenai ketergantungan satu aktor dengan aktor lainnya. Salah satu faktor terjadinya interdependensi ialah perbedaan sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. Sehingga mendorong aktor untuk melakukan kerjasama dengan aktor lainnya. Dalam konteks penelitian ini negara, negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai kebutuhan nasionalnya⁴⁶. Dalam ilmu politik, Wilde

-

⁴⁴ Muhammad. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indonesia tetap memilih melakukan kerjasama perdagangan Impor Sapi dari Australia Paska Penyadapan yang dilakukan oleh Australia.

⁴⁵ Mirela Minca. 2015. *Types of international cooperation at the local level Bucharest city hall case study* dalam Theoretical and Applied Economics Volume XXII (2015), No. 2(603), Summer. Romania: Bucharest City Hall pp. 237-246

⁴⁶ Muhammad. 2017, Loc. Cit.

menyebutkan bahwa interdependensi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perdamaian⁴⁷.

Dalam politik internasional, teori interdependensi merupakan situasi yang diasumsikan Wilde sebagai "independent social actors, who wish to preserve their identity, but who are also structurally affected by another's behavior', 48. Wilde menyatakan dua alasan dua atau lebih aktor terlibat dalam yang disebut sebagai mutual affect, yaitu keterlibatan dalam urusan yang sama atau sama-sama merupakan bagian dari sebuah system yang sama dimana mereka secara tidak langsung saling berhubungan satu dengan yang lainnya⁴⁹. Level interdependensi global meningkat pada masa modernisasi⁵⁰. Peningkatan kebutuhan global dan keterbatasan sumber daya negara secara massif membawa negara akan kesadaran pentingnya kooperasi yang kemudian meningkatkan adanya interdependensi seluruh negara di dunia. Tidak ada negara yang mampu sepenuhnya menyediakan kebutuhannya sendiri. Setiap negara paling tidak menjalin kerjasama bilateral atau multilateral.

Dalam tulisannya yang berjudul Interdependence Theory and the Measurement of International Conflict, Jon Pevehouse menjelaskan beberapa dampak interdependensi antar negara. Yaitu

> "Increasing levels of dependence between states will result in increasing political cooperation among those states" (b) "Higher

⁴⁹ Ibid.

⁴⁷ Jaap De Wilde. 1991. The Concept of Interdependence in Political Science" University of Groningen p.17

⁴⁸ *Ibid*.

⁵⁰ Robert Jackson and Sorrensen.1999. Introduction to International Relations. Oxford University Press Inc: New York pp.67-106

levels of trade dependence between states will lessen the probability of political-military conflict" ⁵¹.

Bedasarkan struktur Wilde membagi interdepedensi kedalam tiga jenis, yaitu interdependensi integratif, interdependensi fungsionalis dan interdependensi sistematis⁵². Yang pertama *intertwinement activities*, yaitu aktivitas saling antar aktor atau partai aktor. Tipe ini disebut interdependensi integratif. Tipe yang kedua tidak menekankan pada unsur aktivitas saling diantara aktor tetapi lebih kepada struktur-struktur yang dibuat oleh aktor itu sendiri⁵³. Tipe ini dibentuk melalui sebuah pemerintahan terinstitusi yang disertai dengan tanggung jawab yuridis yang mengatasi aktor-aktor yang tergabung dalam interdependensi ini. Tipe ini disebu tipe fungsionalis. Tipe ketiga merupakan interdependensi yang sudah terbentuk pada sistem yang sudah ada sebelumnya. Dimana aktor individu tidak mau bergantung pada aktor lainnya karena mereka berada pada system yang sama. Interdependensi jenis ini disebut interdependensi otomatis. Yakni tidak adanya interaksi langsung yang menyebabkan ketergantungan satu sama lain⁵⁴.

Interdependensi memiliki dua bentuk, yaitu interdependensi konstruksional⁵⁵. konfrontasional dan interdependensi Interdependensi konfrontasional mengacu kepada ketergantungan mutual (mutual subjection). Konsep interdependensi inilah yang sering digunakan dalam teori balance of power. Dalam hal ini aktor memiliki beberapa kecenderungan bersama (a) kecenderungan bersama melakukan kekerasan ekstrim (b) kecenderungan bersama untuk menundukkan aktor lain (c) kecenderungan timbal balik dalam

⁵¹ Jon C Pevehouse.2004. *Interdependence Theory and the Measurement of International Conflict*. THE JOURNAL OF POLITICS, Vol. 66, No.1 University of Wisconsin p.248-249

⁵² Jaap De Wilde. 1991, Loc. Cit.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

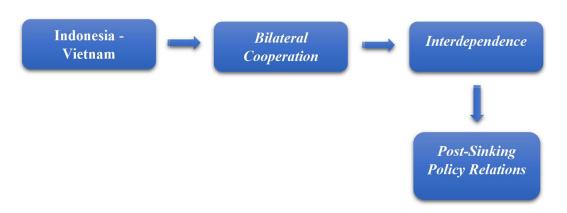
⁵⁵ Ibid

menggunakan segala jenis kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan perlawanan optimal bersifat material maupun non-material⁵⁶. Sedangkan interdependensi konstruksional ialah interdependensi berdasarkan keinginan *(need or want)*. Ini disebut juga sebagai interdependensi asimetris⁵⁷.

Berdasarkan pandangan Pavehouse tingginya interdependensi antar negara berpotensi dalam peningkatan kerjasama dan penurunan konflik. Dalam penelitian ini, teori interdependensi akan menguraikan bagaimana factor interdependensi antara Indonesia dengan Vietnam berpengaruh terhadap kebijakan yang diberlakukan Indonesia di wilayah perairannya serta hubungannya dengan Vietnam.

1.6 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Pada skema diatas *sinking policy* atau kebijakan penenggelaman kapal ikan asing illegal yang diberlakukan Indonesia di wilayah perairannya adalah sumber ketegangan antara Indonesia dengan Vietnam. KIA Vietnam merupakan kapal ikan asing yang paling banyak ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia.

⁵⁶ Jaap de Wilde. 1991, Loc. Cit.

⁵⁷ *Ibid*.

Merespon kebijakan Indonesia, protes muncul dari pemerintah Vietnam. Pada Agustus 2015 juru bicara Kementerian Luar Negeri Hanoi menyatakan bahwa Vietnam menaruh perhatian penuh terhadap langkah Indonesia menenggelamkan kapal-kapal Vietnam⁵⁸. Kerjasama bilateral menjelaskan kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Vietnam. Strategic Partnerships yang dimulai pada tahun kedua negara. 2013 menunjukkan kuatnya hubungan bilateral antar Interdependensi menjelaskan adanya mekanisme ketergantungan satu aktor dengan aktor lain yang berpotensi meminimalisir konflik. Adanya perasaan saling membutuhkan satu sama lain cenderung membawa aktor menyelesaikan konflik melalui diplomasi atau jalur damai dengan tujuan menjaga hubungan antar keduanya.

1.7 Hipotesis

Implementasi sinking policy terhadap IUU fishing ships merupakan tindakan perlindungan terhadap illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah Indonesia terhadap semua kapal asing illegal. Kebijakan ini kemudian menimbulkan ketegangan dalam wilayah regional khususnya negara-negara asal kapal ikan asing salah satunya Vietnam. Kebijakan maritim Indonesia dikhawatirkan mengganggu stabilitas regional dan hubungan bilateralnya dengan para negara tetangga.

⁵⁸ Rusadi Kantraprawira et al. 2018. *The Unbreakable Relations between Indonesia Vietnam Under "Sink the Vessels" Policy: A Complex Systems Approach* Journal of ASEAN Studies, Vol. 6, No. 2 (2018), pp. 155-178. CBDS Bina Nusantara University and Indonesian Association for International Relations

Akan tetapi meskipun muncul tensi dan ketegangan antara Indonesia dan Vietnam, ternyata bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki dampak signifikan yang mempengaruhi hubungan bilateral keduanya. Hal ini disebabkan oleh kuatnya kerjasama antar kedua negara yaitu kerjasama ekonomi yang dilaksanakan salah satunya melalui kegiatan ekspor dan impor. Hal ini juga ditunjukkan melalui Strategic Partnerships Indonesia-Vietnam di bidang ekonomi dan pertahanan keamanan. Kuatnya kerjasama ekonomi tersebut menanamkan interdependensi antara Indonesia dengan Vietnam yang menjadi faktor penting terhadap dampak hubungan kedua negara oleh kebijakan maritim Indonesia.

1.8 Metodologi Penelitian

Defenisi konseptual dan operasional

1.8.1.1 Strategic Partnerships

Menurut Kamus Cambridge, strategic partnership atau kemitraan strategis merupakan persetujuan antara dua perusahaan atau organisasi dengan tujuan membantu satu sama lain untuk mempermudah masing-masing pihak mencapai tujuan mereka⁵⁹. Strategic Partnership adalah mitra interaksi jangka panjang yang dibentuk oleh dua negara berlandaskan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dan sejarah⁶⁰. Meskipun mencakup banuak aspek dalam kerjasama negara, ekonomi, politik, budaya, pertahanan serta teknologi informasi, strategic partnerships

⁵⁹Cambridge Dictionary. 2020. Strategic Partnership [daring] dalam https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strategic-partnership. Diakses: 23 Feb 2020 ⁶⁰ Arvind Gupta and Sarita Azad. 2011. Evaluating India's Strategic Partnerships using Analytic Process [daring] https://idsa.in/idsacomments/EvaluatingIndiasStrategicPartnershipsusingAnalyticHierarchyProcess

cenderung pada isu *security*⁶¹. Tyushka menyebutkan dalam analisis kebijakan luar negeri kemitraan strategis (*strategic partnerships*) telah menjadi kajian yang cukup mutakhir baik dalam kerangka global maupun regional⁶². Kemitraan atau *partnerships* dianggap memiliki kesan yang lebih positif dibandingkan dengan aliansi. *Partnerships* juga lebih memungkinkan negara kecil untuk bermitra dengan *super powers*⁶³. Setuju dengan pendapat ini Laipson menyatakan bahwa pada abad kedua puluh negara cenderung kepada *partnerships* dibandingkan dengan aliansi⁶⁴. Operasionalisasi dari konsep ini digunakan untuk manganalisa kerja sama strategis antara Indonesia dengan Vietnam. *Strategic partnership* tersebut berupa kemitraan strategis dan *mutual interest* secara bilateral.

1.8.1.2 Ekspor

Dalam perkembangan perekonomian, ekspor dan impor merupakan factor yang berperan krusial. Ekspor adalah adalah kegiatan atau upaya melakukan penjualan komoditas dari suatu negara kepada negara lain, dimana transaksi pembayaran dilakukan dengan valuta asing serta melakukan komoditi dengan menggunakan bahasa asing⁶⁵. Kegiatan ekspor mencakup semua barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk barang-barang dan jasa-jasa pada periode tertentu⁶⁶. Investopedia menjelaskan ekspor sebagai proses :

⁶¹ Tyshka Andriy. 2019. Strategic Partnerships, international politics and IR Theory [daring] dalam

https://www.researchgate.net/publication/334476386 Strategic partnerships international politics and IR theory. Diakses: 24 Feb 2020

 $[\]overline{^{62}}$ *Ibid*.

⁶³ Paul. 2008 dalam Tyushka Andriy. 2019, Loc. Cit.

⁶⁴ Laipson.2015 dalam Tyshka Andriy. 2019, Loc. Cit.

⁶⁵ Amir M.S. TT. *Pengertian Ekspor: Definisi, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Ekspor* [daring] dalam https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-ekspor.html. Diakses: 24 Feb 2020 ⁶⁶ *Ibid*.

(a)..a product or service produced in one country but sold to a buyer abroad (b) Exports are one of the oldest forms of economic transfer and occur on a large scale between nations (c) Exporting can increase sales and profits if they reach new markets, and they may even present an opportunity to capture significant global market share⁶⁷.

Bakaria dan Mabrouki menyatakan bahwa ekspor berpotensi meminimalisir dampak dari berubah-ubahnya pasar⁶⁸. Dimana melalui keterlibatan dalam pasar global, perusahaan menjadi lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan ekonomi, perubahan permintaan *costumer* dan fluktuasi dalam pasar lokal⁶⁹. Operasionalisasi dari konsep ini adalah untuk menganalisa interdependensi yang kemudian muncul antara Indonesia dan Vietnam.

1.8.1.3 Impor

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia impor merupakan:

"..import is the activity of entering goods into the customs area. Literally, imports can be interpreted as the activities of entering goods from foreign country into the customs territory of our country (Susilo, 2008)."⁷⁰

Utomo mendefinisikan impor sebagai suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean di dalam negeri yang dilakukan oleh perwakilan dari dua negara, bersifat perorangan maupun perusahaan untuk

68 Sayef Bakari dan Mohamed Mabrouki.2017. Impact of Exports and Imports on Economic Growth: New Evidence from Panama [daring] dalam https://www.researchgate.net/publication/314646735 IMPACT OF EXPORTS AND IMPORT S ON ECONOMIC GROWTH NEW EVIDENCE FROM PANAMA. Diakses: 24 Feb 2020 69 Ibid.

⁶⁷Investopedia. 2020. Export Definition [daring] dalam https://www.investopedia.com/terms/e/export.asp. Diakses: 24 Feb 2020

⁷⁰ Dwi Kartikasari.2017. The Effect of Export, Import and Investment to Economic Growth of Riau Islands Indonesia [daring] dalam https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/download/5217/pdf. Diakses: 24 Feb 2020

memenuhi kebutuhan dalam negeri⁷¹. Dengan kata lain impor merupakan aktivitas pembelian barang atau jasa dari luar negeri. Bakari dan Mabrouki berpandangan bahwa impor salah satu bentuk kelemahan negara dimana negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga secara tidak lansgung memaksa negara tersebut bergantung kepada negara lain⁷².

Dengan demikian berbeda halnya dengan ekspor, impor mengakibatkan keluarnya mata uang lokal dan melemahkan *trade balance* serta melemahkan pertumbuhan ekonomi⁷³. Namun demikian, disisi lain impor juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika barang-barang impor merupakan material yang berpotensi bagi pembangunan negara pengimpor. Hal ini akan meningkatkan pembangunan dan dan memajukan investasi negara pengimpor⁷⁴. Sama halnya dengan ekspor operasionalisasi dari konsep impor juga digunakan untuk menganalisa kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Vietnam.

1.8.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ialah jenis penelitian yang cenderung bersifat menjelaskan fenomena suatu permasalahan, berbeda dengan jenis penelitian lain yang cenderung mendeskripsikan suatu permasalahan misalnya. Penelitian eksplanatif bertujuan memberikan pemahaman yang lebih efisien

23

⁷¹ Susilo Utomo.2008. *Pengertian IMPOR: Arti, Tujuan, Manfaat, Jenis, dan Contoh Impor* [daring] dalam https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-impor.html. Diakses: 24 Feb 2020

⁷² Sayef Bakari dan Mohamed Mabrouki.2017, Loc. Cit.

⁷³ *Ibid*.

⁷⁴ *Ibid*.

terhadap permasalahan yang diteliti⁷⁵ dengan menghubungkan suatu isu dengan prinsip-prinsip umum⁷⁶. Keuntungan dari penelitian jenis ini ialah peneliti mendapat kemudahan atau fleksibilitas sumber⁷⁷. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak kebijakan perairan yang diberlakukan Indonesia di wilayahnya dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateralnya dengan Vietnam.

1.8.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini terdiri atas jangkauan ruang dan waktu. Jangkauan ruang dalam penelitian ini ialah dampak kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan keamanan laut dan sumber daya ikannya dengan menenggelamkan kapal-kapal ikan asing yang memasuki serta melakukan illegal fishing. Adapun batasan jangkauan waktu yang digunakan ialah pada mulai tahun 2015 hingga tahun 2019. Jangka waktu penelitian dimulai pada tahun 2015 merupakan tahun dimana scuttling policy mulai dilaksanakan secara konsisten. Hingga berakhir pada tahun 2019 dimana terjadi pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan kebijakan ini tidak lagi konsisten diimplementasikan oleh Menteri yang baru.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

-

⁷⁵ Muhammad Yousaf. TT. Explanatory Research Definition, Types, Comparison, Advantages, disadvantages [daring] dalam https://scholarshipfellow.com/explanatory-research-definition-types-comparison-advantages-disadvantages/. Diakses: 28 Januari 2020

⁷⁶ W. Lawrence Neuman. 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, 4th ed. Boston: Allyn & Bacon. Hlm.22 dalam "Dr Ulber Silalahi MA. 2012.Metode Penelitian Sosial. Bandung: IKAPI. Hlm.25-26

⁷⁷ Muhammad Yousaf.tt, Loc. Cit.

Suyanto dan Sutinah menyatakan bahwa data digolongkan berdasarkan asal sumbernya yaitu data primer dan sekunder⁷⁸. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari media, lembaga atau institusi tertentu⁷⁹. Selain itu sumber data sekunder umumnya juga diperoleh dari laporan, hasil riset, koran, atau artikel. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah data sekunder yakni sumber-sumber data berupa jurnal, artikel, memorandum dan laporan lainnya. Juga data primer apabila nantinya diperlukan dan tersedia untuk diakses oleh penulis.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Suyanto dan Sutinah berpendapat ada dua jenis teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif⁸⁰. Yang membedakan kedua jenis teknik analisis tersebut adalah sifat datanya⁸¹. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang hanya memiliki sedikit data dan terdiri atas kasus-kasus yang tidak dapat disusun secara klasifikatoris⁸². Teknik analisis kuantitatif sering juga disebut sebagai analisis statistik. Berbeda dengan teknik analisis kualitatif, analisis kuantitatif cederung memiliki sejumlah besar data dan mudah diklasifikasikan dalam berbagai kategori⁸³.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Kelebihan analisis kualitatif dibandingkan dengan analisis kuntitatif ialah analisis

⁷⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah.2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm.55-56

⁷⁹ *Ibid*.

⁸⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah. 2005, Loc. Cit.

⁸¹ Ibid.

⁸² *Ibid*.

⁸³ *Ibid*.

kualitatif lebih baik dalam memahami kehidupan sosial yang kompleks dan direduksi dalam bentuk variabel⁸⁴. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik analisis kualitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata yang dianalisa dan kemudian disimpulkan⁸⁵.

1.8.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab utama. Yang tersusun atas :

BAB I merupakan metodologi penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, *level of analysis*, landasan teori, sintesa pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang tersusun atas definisi konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II akan tersusun atas data dan studi literatur mengenai kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Vietnam. Bab ini akan menguraikan *Strategic Partnership* yang terdiri atas kerja sama ekonomi dan pertahanan kedua negara.

BAB III merupakan analisis penelitian berdasarkan data dan studi literatur. Bab ini menjelaskan interdependensi Indonesia Vietnam dan analisa dampak dari kebijakan *Sinking IUU Fishing Ships* terhadap hubungan bilateral kedua negara.

Bab IV ialah bagian kesimpulan penelitian dan saran. Bagian ini menguraikan secara ringkas hasil analisis penelitian dari Bab I hingga Bab III.

-

⁸⁴ Emy Susanti Hendrarso dalam Suyanto dan Sutinah.2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif dan Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 165

⁸⁵ Dr Ulber Silalahi, MA. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: IKAPI. Hlm.339